

LAPORAN PENELITIAN PEMBINAAN
Upaya Meningkatkan Pariwisata Kota Lama Semarang,
Jawa Tengah



Oleh

1. Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si 0022046308
2. Satwika Paramasatya, S.I.P., MA
3. Nadia Farabi, S.Hub.Int., MA

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP Undip
Tahun Anggaran 2018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Upaya Meningkatkan Pariwisata Kota Lama Semarang, Jawa Tengah
2. Kategori Tema : Pembangunan Manusia
3. Bidang Ilmu : Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Pemerintahan
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si.
 - b. NIP/NIDN : 196304221989032001 / 0022046308
 - c. Jabatan Fungsional/Gol : Lektor / 3c
 - d. Fakultas/Departemen : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
 - e. Alamat Kantor/Telp/Fax/Email : Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang
 - f. Alamat Rumah/Telp/Fax/Email : Jl. Tlogosari I No. 44 A, RT 01/RW 01, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang
Telp. 024 76482700
5. Anggota Peneliti I
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Satwika Paramasatya, S.I.P., MA
 - b. NIP/NIDN : -
 - c. Departemen : Hubungan Internasional
6. Anggota Peneliti II
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Nadia Farabi, S.Hub.Int., MA
 - b. NIP/NIDN : -
 - c. Departemen : Hubungan Internasional
7. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
8. Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan
9. Biaya yang Diperlukan : Rp. 25.000.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
10. Sumber Dana : DIPA FISIP Undip Tahun Anggaran 2018

Semarang, 21 November 2018

Mengetahui
Pimpinan Fakultas

Dr. Sunarto, M.Si
NIP. 19660727 199203 1 001

Ketua Peneliti



Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si
NIP. 19630422 198903 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Judul Riset

Upaya Meningkatkan Pariwisata Kota Lama Semarang, Jawa Tengah

1.2 Latar Belakang

Salah satu sudut Kota Semarang yang saat ini gencar dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memikat wisatawan adalah Kota Lama Semarang (kompas.com, 2018). Kawasan Kota Lama Semarang, atau sering juga disebut Little Netherland, berisi gedung-gedung tua yang dibangun sejak zaman Belanda (bpad.jogjapro.go.id, 2016). Kawasan tersebut terpusat dari Sungai Mberok hingga menuju daerah Terboyo. Saat ini, kawasan Kota Lama Semarang tengah diusulkan menjadi kota warisan budaya dunia UNESCO¹ (Kompas, 2017).

Meski memiliki bangunan-bangunan khas gaya Eropa yang menarik wisatawan, kawasan Kota Lama Semarang tergolong sebagai salah satu kawasan di Kota Semarang yang rawan banjir. Berdasarkan pertemuan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FKRB) Kota Semarang pada 22 Maret 2018, tingkat risiko bencana Kota Semarang memang tergolong tinggi, yakni mencapai angka 60% (Suara Merdeka, 2018). Kampung Melayu yang berada di tepi Kali Semarang, misalnya, seringkali terendam rob hingga menggenangi kawasan permukiman. Hal ini mendorong UNESCO untuk meminta Pemerintah Kota Semarang menyusun strategi pengurangan risiko bencana, utamanya di kawasan cagar budaya Kota Lama (Kompas, 2017). Pengurangan risiko bencana penting dilakukan, dalam rangka menjaga kelestarian kawasan tua tersebut. Lebih lanjut, pengurangan risiko bencana di Kota Lama Semarang perlu dilakukan, agar tidak mengurangi minat wisata di kawasan tersebut. Penanganan bencana tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Jumlah wisatawan yang masuk ke Kota Semarang, baik dari dalam maupun luar negeri, terus mengalami peningkatan (semarangkota.bps.go.id, 2017). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi, yang antara lain memudahkan masyarakat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS)

¹ Singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atau organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bergerak di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan.

Provinsi Jawa Tengah secara rutin mendata jumlah wisatawan yang masuk melalui Bandara Ahmad Yani Semarang. Berdasarkan data tersebut, antara lain dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani terus meningkat.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2015), jumlah wisatawan asing yang melalui pintu masuk Bandara Ahmad Yani pada bulan Pebruari 2015 mencapai 869 orang. Pada bulan yang sama di tahun berikutnya, yakni Pebruari 2016, jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Bandara Ahmad Yani mencapai 1.080 orang (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016). Secara akumulatif, jumlah wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani pada tahun 2015 mencapai 14.279 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016, menjadi 17.079 orang. Pada akhir tahun 2017, BPS Provinsi Jawa Tengah (2017) kembali mengeluarkan Berita Resmi Statistik yang membahas perkembangan pariwisata di Kota Semarang bulan Januari hingga Nopember 2017, yang jika diakumulasi mencapai 22.951 orang². Jumlah tersebut membuktikan bahwa wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

Pembangunan di Kota Semarang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang terus berupaya meningkatkan industri pariwisata dan industri-industri lain yang berkaitan dengan industri pariwisata, seperti penginapan dan transportasi³. Pariwisata menjadi salah satu industri yang penting dan menjanjikan bagi perekonomian dunia saat ini, baik bagi negara maju maupun bagi negara berkembang. Tidak dapat dipungkiri, industri pariwisata membantu membuka lapangan kerja dan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan industri-industri lain yang relevan dengan industri pariwisata tersebut. Berbagai

keuntungan tersebut membuat berbagai kota di berbagai negara memiliki harapan yang tinggi terhadap industri ini.

² Data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 tidak mencantumkan data pada bulan Desember. Mengamati Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah yang terbit pada tahun-tahun sebelumnya, data bulan Desember akan ditambahkan pada edisi berikutnya, dalam hal ini berarti Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

³ Data dari BPS Kota Semarang (2016) menunjukkan bahwa jumlah hotel berbintang di Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, ada 48 hotel berbintang di Kota Semarang, dengan jumlah kamar sebanyak 4414. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016, menjadi 63, dengan total kamar mencapai 6.758. Bertambahnya jumlah hotel berbintang di Kota Semarang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Data di atas menggambarkan potensi dan ancaman industri pariwisata Kota Semarang. Di satu sisi, Kota Semarang memiliki kawasan dengan gedung-gedung bersejarah di Kota Lama Semarang yang mampu menarik wisatawan, sementara di sisi lain, kawasan tersebut juga rawan bencana banjir. Dengan demikian, diperlukan strategi⁴ pembangunan yang memberikan perhatian terhadap keduanya. Penelitian ini fokus pada pengelolaan industri pariwisata Kota Lama Semarang, dengan menyoroti kondisi sosio-ekonomi masyarakat serta sumber daya yang dimiliki Kota Lama Semarang saat ini. Penelitian ini akan melihat infrastruktur yang tersedia di Kota Lama Semarang, sehingga dapat dicari strategi pembangunan yang memungkinkan untuk dikembangkan di Kota Lama Semarang, dalam rangka meningkatkan industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Lama Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pembangunan yang memungkinkan (*feasible*) untuk dikembangkan di Kota Lama Semarang, dalam rangka meningkatkan industri pariwisata di kawasan tersebut?

1.4 Tujuan Riset

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mencari model pembangunan yang dapat diterapkan di Kota Lama Semarang. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang potensi dan ancaman Kota Lama Semarang;
2. Untuk mengidentifikasi upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam membangun Kota Lama Semarang;
3. Untuk mengeksplorasi strategi pembangunan yang memungkinkan (*feasible*) untuk diterapkan di Kota Lama Semarang.

1.5 Kontribusi Riset

Dengan adanya riset ini, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan keunggulan penelitian Universitas Diponegoro, serta meningkatkan daya saing Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian social humaniora, yang sejalan dengan fokus bidang penelitian Universitas Diponegoro, yakni

⁴ Menurut Collins Dictionary, strategi adalah rencana tindakan atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model pembangunan yang memungkinkan diterapkan di Kota Lama Semarang, melalui kacamata Hubungan Internasional. Selama ini, konsep-konsep yang dipelajari dalam Hubungan Internasional dianggap sulit untuk membumi dengan kondisi di akar rumput. Penelitian ini diharapkan menambah ragam penelitian dalam Hubungan Internasional.

1.6 Luaran Riset

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Kota Lama Semarang. Publikasi yang dimaksud adalah publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah internasional bereputasi.

1.7 Kerangka Pemikiran

Bencana terjadi ketika *hazards* dan *vulnerability* bertemu (who.int, 2003). Sehingga, tanpa *hazard* atau *vulnerability*, tidak akan ada bencana. Manusia akan menjadi korban bencana apabila manusia tersebut *vulnerable* terhadap *hazard*. Negara yang masuk dalam *the top five most disaster-hit* UNISDR adalah Cina, India, AS, Filipina, dan Indonesia (unisdr.org, 2016).

Fenomena alam terus terjadi di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini membuktikan bahwa fenomena alam mengancam setiap negara, tidak hanya negara berkembang. Namun, bahaya atau ancaman yang dimiliki oleh wilayah satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selain memiliki ancaman yang berbeda, setiap wilayah, bahkan dalam satu negara sekalipun, memiliki tingkat kerentanan (*vulnerability*) yang berbeda-beda. Ancaman tersebut pada akhirnya akan mendorong terjadinya bencana, apabila masyarakatnya rentan atau tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam dirinya (Collins, 2009: 218). Perbedaan ancaman dan kerentanan antar wilayah ini kemudian menjadi alasan mengapa jumlah dan tingkat risiko bencana (*disaster risk*) di setiap wilayah berbeda-beda.

Bencana banjir dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di Indonesia, dan tidak hanya di Kota Semarang. Tetapi, mengacu pada penjelasan di atas, tingkat risiko bencana di Kota Semarang dan di kota rawan banjir lainnya berbeda, karena perbedaan tingkat kerentanan masyarakat

terhadap fenomena banjir. Risiko bencana dapat dihitung dengan rumor yang dikembangkan oleh Wisner dkk (2004) di bawah ini:

$$\text{Disaster risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Besar kecilnya genangan air mempengaruhi tingkat risiko bencana banjir. Tetapi, mengacu pada rumus di atas, genangan air yang besar tidak akan serta-merta menyebabkan risiko bencana banjir yang besar, apabila penduduk tidak rentan dan siap menghadapi ancaman banjir. Sebaliknya, tingkat kerentanan masyarakat (terhadap banjir) yang tinggi menyebabkan besarnya risiko bencana. Artinya, manusia tidak akan bisa menghentikan atau menghilangkan fenomena alam, tetapi manusia dapat mencegah agar fenomena alam tidak berisiko tinggi pada manusia dan lingkungan.

Kerentanan masyarakat dilihat dari berbagai faktor, seperti infrastruktur. Infrastruktur yang buruk dan bahan bangunan yang tidak berkualitas dapat menyebabkan bencana alam. Sebaliknya, masyarakat dengan infrastruktur yang baik dapat lebih tangguh menyikapi ancaman banjir. Upaya pengendalian banjir di Kota Lama Semarang pun perlu memperhatikan hal-hal tersebut, guna meminimalisir dampak merugikan dari fenomena banjir. Berbeda dengan gempa yang belum dapat diprediksi kapan terjadinya, banjir dapat diprediksi. Dengan memprediksi terjadinya banjir dan mengatasi kerentanan penduduk Kota Lama Semarang dalam menghadapi ancaman banjir sekaligus, maka upaya pengurangan risiko bencana banjir semakin dimungkinkan.

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) selalu memperbarui indeks rawan bencana Indonesia setiap dua tahun. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dikembangkan atas dasar konsep analisis riwayat kebencanaan yang terjadi dan memberikan kerugian signifikan pada suatu wilayah, hingga di tingkat kabupaten atau kota (BNPB, 2011: vi). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa frekuensi kejadian bencana dan tingkat kerusakan maupun korban jiwa semakin meningkat di Indonesia. Kondisi geologi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yakni Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian utara, dan Lempeng Pasifik di bagian timur, membuat ancaman bencana di wilayah

Indonesia sepertinya tinggal menunggu waktu (BNPB, 2011: hal 1). Salah satu bencana yang rutin terjadi adalah bencana banjir di musim hujan.

Pada umumnya, banjir terjadi karena curah hujan tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air alamiah (seperti sungai dan anak sungai) dan sistem drainase penampung banjir tidak mampu menampung akumulasi air hujan, hingga meluap. Inilah yang terjadi di Kota Lama Semarang. Kondisi hidrologi Kota Semarang membuat indeks rawan bencana banjirnya tinggi, mengancam keamanan manusianya. Bencana banjir pada umumnya menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa, serta membutuhkan waktu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh sebab itu, mitigasi bencana banjir diperlukan agar tidak mengganggu agenda pembangunan Kota Semarang.

Agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh bencana alam, kebijakan pembangunan juga tidak dapat memprioritaskan pertumbuhan ekonomi saja. Pada umumnya, kebijakan pembangunan yang hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek lingkungan dan manusia. Sumber daya alam, termasuk lahan serta sumber daya manusia, dipandang sebagai modal atau faktor-faktor produksi yang dieksploitasi (Collins, 2009: 47-48). Menanggapi fenomena ini, A. Beck berpendapat bahwa “... *in the modern phase of development, people had been prepared to ignore or accept social and ecological side effects of development, in return for an improved material quality of life*”.

Selama ini, pembangunan yang berorientasi ekonomi lebih memandang bencana sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi, dan bukan sebaliknya, yakni bahwa pembangunan dapat meningkatkan potensi bencana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah dan masyarakat melihat bencana, seperti yang pernah diungkapkan oleh Eduardo Cavallo dkk (2009: 2) berikut:

"The destruction of capital (physical or human) will therefore not affect the rate of technological progress and will only enhance short-term growth prospects since it will drive countries away from their balanced-growth steady states. The loss of capital caused by natural disasters will lead to more rapid capital accumulation and thus to a higher temporary growth path until the economy reaches back to its steady state."

Selain itu, asumsi kedua berdasar pemikiran Cavallo dkk (2009: 3-4) adalah:

“On the one hand the destruction of capital leads to reduced productive capacity that will lead to lower GDP growth until the reconstruction is complete. On the other hand.... the additional demand for investment to replace destroyed capital leads to a boost in economic activity. Other potential short-run effects can lead to either reduction in growth (e.g., increased perception of future disasters leads to decrease in investment demand) or to a boom (e.g., upgrading of production networks demolishes inefficiencies of the old regime).”

Secara umum, pembangunan yang berorientasi pada ekonomi melihat bencana alam sebagai peristiwa yang berpengaruh terhadap modal, baik lahan maupun manusia, dengan fokus penanganan bukan pada aspek-aspek humanitarianisme, seperti peningkatan kapasitas untuk mengurangi kerentanan, melainkan lebih kepada bagaimana keuntungan dan pertumbuhan ekonomi kembali stabil setelah rekonstruksi. Segala aktivitas yang dilakukan adalah untuk mengembalikan investasi atau bahkan untuk meningkatkan teknologi dalam jaringan produksi yang sebelumnya menyebabkan inefisiensi ketika bencana terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang lebih fokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan kemanusiaan justru menjauhkan pembangunan dari tujuan awal, yakni peningkatan taraf hidup manusia, sebab yang menjadi perhatian adalah keuntungan dan bukan alam ataupun manusia itu sendiri. Upaya mitigasi, misalnya, merupakan upaya yang bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi semata, karena banjir yang terjadi dilihat sebagai *temporary impediment* terhadap efisiensi produksi dan reproduksi. Sehingga, terjadi perubahan paradigma dalam diskursus bencana dan pembangunan.

Pada tahun 1950an hingga 1960an, bencana dipahami sebagai suatu ancaman. Pendekatan teknis struktural dimasukkan sebagai upaya untuk menjinakkan sang alam. Dam, proyek-proyek irigasi, konstruksi *anti-seismic*, dan sejenisnya dijadikan sebagai solusi. Sementara itu, memasuki tahun 1980an dan 1990an, kerangka yang berbeda mulai dikembangkan. Bencana pada waktu itu dipandang sebagai kegagalan pembangunan; sebuah gejala *maldevelopment* dan akumulasi kontradiksi karena pembangunan yang gagal. Dalam pemahaman ini, masyarakat

memiliki risiko tinggi terhadap bencana karena hasil keputusan yang dibuat oleh pasar atau oleh orang-orang yang memiliki kekuatan politis. Peristiwa-peristiwa alam yang ekstrem menjadi pemicu, dan bukan penyebab fundamental terjadinya bencana. Hal ini membuktikan bagaimana bencana pada abad 21 diteorikan dalam konteks pembangunan dan *vice versa*.

Banyak akademisi dan pembuat kebijakan yang memandang alam tidak lagi sebagai penyebab otonom dari bencana, melainkan bagian dari sistem masyarakat dan alam yang rumit, dengan interaksi sebab-akibat yang tidak merata antar negara dan di dalam negara itu sendiri (disebabkan oleh kelas, *gender*, etnis, wilayah, dan sebagainya). Hasilnya adalah kewajiban inklusifitas yang seharusnya tercermin dalam konsensus kebijakan dengan pula memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan, adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko. Sebuah kebijakan yang komprehensif harus diformulasikan untuk mengurangi tingkat kerentanan (Wisner & Gailard, 2009: 151).

1.8 Metode Riset

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif pada umumnya bertujuan untuk menjajaki suatu permasalahan, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif strategi pembangunan yang memungkinkan diterapkan di Kota Lama Semarang. Penelitian eksploratif cocok digunakan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar atau awal dari penelitian-penelitian selanjutnya. Sebagai contoh, berangkat dari penelitian eksploratif ini, dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan desain penelitian deskriptif, yang menggambarkan implementasi strategi pembangunan. Selanjutnya, dapat dilakukan penelitian dengan desain penelitian eksplanatif, yang menjelaskan dampak dari strategi pembangunan tersebut bagi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian ini akan didapatkan dari literatur berupa buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sementara, observasi dilakukan di lapangan, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan. Terakhir, terkait wawancara, sasaran dari

wawancara antara lain adalah Pemerintah Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang, dan masyarakat di lingkungan Kota Lama Semarang.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2006: 257), yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1.9 Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan selama delapan bulan, dengan rincian kegiatan penelitian seperti yang tercantum berikut:

No.	Kegiatan	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pembuatan instrumen dan pengurusan etik penelitian								
2.	Pelatihan petugas lapangan								
3.	Pengumpulan data (pelaksanaan survei dan wawancara)								
4.	Pelaporan data								

5.	Analisis data								
6.	Pembuatan laporan akhir								
7.	Seminar hasil penelitian								
8.	Penyerahan laporan penelitian								

Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian

Komponen	Presentase	Biaya yang Dipakai (Rp.)
Belanja jasa dan bahan habis pakai (1)	40%	20.000.000
Perjalanan dan akomodasi (2)	30%	15.000.000
Luaran (3)	30%	15.000.000
Jumlah	100%	50.000.000

BAB II

KOTA SEMARANG DAN KOTA LAMA

2.1 Kondisi Terakhir dari Kota Lama Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan juga merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang termasuk kawasan yang bersejarah. Salah satu sudut Kota Semarang yang saat ini gencar dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memikat wisatawan adalah Kota Lama Semarang (kompas.com, 2018). Kawasan Kota Lama Semarang atau sering disebut dengan “The Little Netherland” merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi karena memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi mengingat banyaknya peninggalan penjajahan Belanda dan banyak bangunan-bangunan yang masih kokoh hingga saat ini seperti GPIB (Gereja Protestan Indonesia bagian Barat), Stasiun Tawang, dan masih banyak bangunan lainnya yang masih menjadi objek pariwisata. Hingga sekarang, banyaknya gedung bersejarah yang ada di kawasan Kota Lama sendiri merupakan hasil dari pemukiman orang Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai pedagang. Tidak hanya itu, infrastruktur yang ada di kawasan Kota Lama Semarang juga sudah sangat berkembang. Menurut data pada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011, total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama Semarang mencapai 274 unit yang terdiri dari bangunan perumahan dan juga perkantoran. Saat ini, kawasan Kota Lama Semarang tengah diusulkan menjadi kota warisan budaya dunia UNESCO (Kompas, 2017).

Dengan adanya usulan dari UNESCO sendiri untuk membuat Kota Lama Semarang sebagai kota warisan budaya, Pemerintah Kota Semarang terus melakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata untuk mewujudkan kawasan Kota Lama Semarang sebagai “*World Heritage 2020*”. Hal ini disebabkan pula karena terjadinya peningkatan jumlah wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2015), jumlah wisatawan asing yang melalui pintu masuk Bandara Ahmad Yani pada bulan Pebruari 2015 mencapai 869 orang. Pada bulan yang sama di tahun berikutnya, yakni Pebruari 2016, jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Bandara

Ahmad Yani mencapai 1.080 orang (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016). Secara akumulatif, jumlah wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani pada tahun 2015 mencapai 14.279 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016, menjadi 17.079 orang. Pada akhir tahun 2017, BPS Provinsi Jawa Tengah (2017) kembali mengeluarkan Berita Resmi Statistik yang membahas perkembangan pariwisata di Kota Semarang bulan Januari hingga Nopember 2017, yang jika diakumulasi mencapai 22.951 orang. Jumlah tersebut membuktikan bahwa wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

Ketika Kota Lama menjadi Situs Warisan Pusaka UNESCO sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah Kota Semarang, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Indonesia khususnya Semarang sendiri dalam hal promosi berskala internasional. Namun, apakah masyarakat di Kota Semarang khususnya di kawasan Kota Lama siap untuk mendukung hal tersebut? Dari mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha melakukan revitalisasi untuk menjadikan Kota Lama sebagai ikon Kota Semarang. Bahkan, Pemkot Semarang mengalokasikan Rp.69 miliar (Kompas, 2016) untuk perbaikan infrastruktur Kota Lama seperti perbaikan drainase, mengingat kawasan Kota Lama yang sering terkena banjir apabila terjadi hujan deras.

Tidak hanya perbaikan drainase, perbaikan jalan yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang juga sudah dilakukan. Dua jalan, yakni Jalan Merak dan Jalan Mpu Tantular sudah diperbaiki dan diteruskan ke jalan lain. Namun, masyarakat Semarang sendiri sepertinya masih kurang berkontribusi dalam pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang itu sendiri. Sejak tahun 2003, Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lama. Namun, pada realita yang ada, pelaksanaannya kurang bisa diterapkan. Sebagai contohnya larangan truk yang berbobot lebih dari 3 ton untuk melintas. Nyatanya masih banyak truk yang overweight berlalu-lalang pada siang dan malam. Pada tahun 2017, total anggaran yang diperlukan untuk Kota Lama Semarang adalah sebesar Rp.156 miliar (Kompas, 2017). Sejumlah penataan sudah dilakukan seperti perbaikan jalan dan drainase yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Semarang terutama melalui wisata. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR juga sudah

membuat fasilitas tambahan di kawasan Kota Lama seperti tempat duduk panjang, tempat sampah, lampu penerangan jalan utama, dan trotoar

Dalam segi akomodasi dan infrastruktur, kawasan Kota Lama Semarang sebenarnya sudah mulai dibenahi menjadi objek tujuan wisata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang merupakan peninggalan Belanda, dan juga dibangunnya hotel hotel berbintang di daerah Kota Lama. Tidak hanya itu, transportasi juga sudah sangat berkembang. Penerbangan menuju Semarang bisa dijangkau dari sejumlah kota besar, bahkan penerbangan internasional seperti dari Malaysia dan Singapura. Kota Lama Semarang, mempunyai potensi yang besar untuk menjadi Kawasan Wisata Semarang, mengingat kawasan tersebut adalah wilayah bekas benteng pertahanan kolonial Belanda, dengan gereja Blenduk sebagai obyek yang banyak dikunjungi wisatawan.

Permasalahan utama yang ada di Kawasan Kota Lama ini adalah terkait kepemilikan lahan. Lahan lahan yang diduduki oleh bangunan yang ada di Kawasan Kota Lama ini umumnya merupakan milik individu. Kepemilikan atas lahan pada Kawasan Kota Lama menjadikan langkah untuk melakukan konservasi di Kota Lama semakin terhambat. Klaim lahan pada Kota Lama ini umumnya terjadi karena sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan merupakan warisan turun temurun yang menjadikan pengelolaan atas tanah dan bangunannya menjadi terhambat, sehingga pemerintah Kota Semarang yang akan melakukan pembenahan terhadap Kawasan Kota Lama juga ikut terhambat.

Bangunan-bangunan di Kawasan Kota Lama umumnya dimanfaatkan sebagai gudang-gudang milik pengusaha yang menjadi pemilik sah atas tanah di Kota Lama. Pemanfaatan bangunan menjadi pergudangan ini memberikan kesan kumuh dan tidak aman untuk kawasan Kota Lama. Hal ini dikarenakan aktivitas bongkar muat barang pada gudang yang tidak rutin dan bersifat periodik membuat pemanfaatan bangunan sangat minim aktivitas. Hal ini menjadikan kota Lama terkesan sangat sepi pada malam hari. Hanya beberapa bangunan yang digunakan sebagai aktivitas publik, seperti tempat makan dan tempat peribadatan. Kualitas lingkungan yang buruk di Kota Lama juga menjadi salah satu permasalahan rumit bagi pemerintah Kota Semarang, serta keamanan kawasan Kota Lama sebagai salah satu tujuan wisatawan juga merupakan permasalahan lain yang harus diselesaikan.

Kualitas lingkungan ini menyangkut dengan permasalahan banjir yang tidak kunjung usai di Kota Lama. Pada tahun 2013, pesisir Kota Semarang yang mengalami banjir hebat berdampak kepada Kota Lama. Aliran Kali Mberok dan Polder Tawang yang berada di Kawasan Kota Lama seharusnya menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengoptimalkan kembali aliran Kali Mberok dan pompa pada Polder Tawang, dapat dijadikan salah satu solusi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan banjir di kawasan Kota Lama. Permasalahan lain yaitu berkurangnya aktivitas perkotaan, yang semakin lama akan menyebabkan lumpuhnya kota lama. Beberapa hal yang menjadi penyebab berkurangnya aktivitas di Kota Lama Semarang antara lain adalah kondisi lingkungan di kawasan tersebut yang kurang terawat. Hal itu mengakibatkan rusaknya bangunan-bangunan dan lingkungan di Kota Lama Semarang. Selain itu, adanya pergeseran bentuk kolonial yang mendorong masyarakat dan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembangunan yang cenderung menuju konsep kota modern menyebabkan kota-kota lama ditinggalkan dan kurang mendapat perhatian.

2.2 Sejarah Kota Lama Semarang

Pembangunan dari Kota Lama Semarang dimulai pada sekitar abad 18. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan colonial Belanda, dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Awalnya kawasan ini dikenal dengan nama Kota Benteng karena yang dibangun pertama kali adalah sebuah benteng yang bernama *Vijfhoek* yang digunakan sebagai tempat tinggal dan pusat militer oleh warga Belanda. Oleh sebab itu, sebutan Kota Lama merupakan bagian dari bekas Belanda yang dibatasi oleh benteng de Vijfhoek (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTBL Kawasan Kota Lama). Kemudian, pemukiman Belanda mulai bertumbuh di sisi Timur benteng *Vijfhoek*. Banyak perumahan, gereja dan bangunan perkantoran yang dibangun di pemukiman ini. Pemukiman ini merupakan cikal bakal dari Kota Lama Semarang itu sendiri. Istilah benteng digunakan untuk menyebut kota Semarang perdana yang berada di dalam benteng kota termasuk daerah penyangga disekelilingnya. Menurut para arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta menuturkan bahwa berdasarkan kumpulan sumber pustaka dan dokumen berupa gambar-gambar peta Semarang kuna beserta analisis yang dilakukan menunjukkan setidaknya rentang perjalanan Kota Lama Semarang dapat dibagi dalam tiga fase besar (Sugeng Riyanto, 2009), yaitu:

1. Fase I (1677 – 1741)

Fase I (de Vijfhoek van Samarangh), di kenal dengan Fase Prabenteng Kota, dalam fase tersebut apabila dipersempit di pulau Jawa bagian tengah akan terangkai cerita sejarah antara lain: perjanjian antara VOC dengan Amangkurat II pada tahun 1677, yang berisi pemberian hak kepada VOC untuk mendirikan benteng pertahanan di setiap pelabuhan di wilayah kekuasaan Mataram, pemberontakan Trunojoyo kepada Mataram sampai perpindahan benteng dan pusat kekuatan VOC dari Jepara ke Semarang.

2. Fase II (1756 – 1824)

Fase II (Benteng Kota) merupakan fase hancurnya benteng de Vijfhoek diperkirakan antara tahun 1741-1756 karena pada tahun 1756 sudah berdiri benteng kota. Selama kurun waktu kurang lebih 68 tahun sebelum benteng kota dihancurkan sendiri oleh VOC pada tahun 1824 nampaknya cikal bakal kota Semarang tumbuh dan berkembang pesat hingga menyambung jalan pos Anyer – Panarukan yang dibangun pada tahun 1808 sampai 1811 oleh Daendels melewati kota Semarang. Karena pertumbuhan kota yang cepat dan memerlukan komponen kota yang mendukung hingga akhirnya demi perkembangan kota maka dihancurkanlah benteng kota pada tahun 1824.

3. Fase III (1824 – 1866).

Fase III (Pasca Benteng Kota) merupakan fase yang lebih jelas, bagaimana upaya Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kota Semarang. Dinamika dan potret sebuah kota antara lain terlihat pada kegiatan ekonomi; prasarana untuk transportasi air dan darat mulai dikisahkan dalam sumber-sumber tertulis. Di era ini bisa tergambarkan bahwa kota Semarang yang secara geografis memiliki pantai, dataran rendah dan dataran tinggi terus tumbuh dan berkembang hingga era pra kemerdekaan. Dirintisnya jalur transportasi kereta api pertama, yakni jalur Semarang – Tanggung sepanjang 25 km yang perletakan batu pertamanya dilakukan oleh gubernur jenderal Baron Sloet van de Beele pada tanggal 17 Juni 1864 adalah satu contoh bahwa Semarang adalah kota pilihan yang amat diperhitungkan dari berbagai aspek. Sudah dapat dipastikan berkembangnya ekonomi pada masa itu menggerakkan sektor lain termasuk permukiman dan kota.

2.3 Upaya Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Kota Semarang

Dalam meningkatkan ecotourism Kota Lama Semarang, sudah ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat menjadikan kawasan Kota Lama Semarang dapat menjadi suatu kawasan yang memiliki nilai pariwisata. Untuk mengembangkan kehidupan kultural di Kota Lama Semarang, telah direncanakan program seperti revitalisasi bangunan kuno peninggalan Belanda yang tadinya masih berdiri namun dengan kondisi yang sangat tidak layak. Pemerintah Kota Semarang juga mengembangkan museum yang berisikan tentang Kota Lama, menentukan Landmark kota dan melakukan peningkatan terhadap benda hasil budaya dan juga kerajinan serta masakan khas.

Tidak hanya dalam segi infrastuktur, Pemerintah Kota Semarang juga sudah berusaha dalam menghidupkan usaha usaha dan juga melakukan peningkatan di sektor entertainment. Hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pengembangan UMKM, adanya pedagang di sekitar kawasan Kota Lama dan juga menyediakan kegiatan yang dapat diikuti masyarakat Kota Semarang seperti frestival yang bertemakan budaya sehingga dapat mempromosikan kesenian-kesenian Kota Semarang. Bahkan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konservasi pada kawasan Kota Lama Semarang, dengan mengacu pada Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Dati II Semarang No.646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Konservasi Bersejarah di Wilayah Dati II Semarang, Perda No.8/2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama, dan kemudian Peraturan Wali Kota No.12/2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, Perwal No.37/2011 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perda No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Upaya pemerintah tersebut diantaranya akan mengkonservasi sebanyak 105 bangunan peninggalan zaman Belanda di kawasan Kota Lama Semarang, sebagai bentuk dari penataan agar bisa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Dengan total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama sebanyak 245 bangunan, dengan perincian 177 bangunan milik pribadi dan 68 bangunan milik perusahaan, baik negeri maupun swasta, dan yang akan dikonservasi sebanyak 105 bangunan. Bangunan yang akan dikonservasi tersebut, diantaranya adalah 31 bangunan di

Jalan Letjen Soeprapto, enam bangunan di Jalan Mpu Tantular, dan tujuh bangunan di Jalan Merak.

Tahap pelestarian kawasan kota lama Semarang	
Tahap I	Tahap II
Perencanaan Konsep	Pelestarian dan Pemeliharaan

1. Tahap I (PERENCANAAN KONSEP)

Perencanaan konsep dilakukan sebagai dasar dari pemerintah untuk melakukan pengembangan maupun pelestarian dan pemeliharaan. Tahap ini berisikan peraturan-peraturan yang menjadi acuan bagi setiap pihak untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan ekoturisme di kawasan Kota Lama Semarang. Peraturan mengenai pelestarian dan konservasi serta pengembangan Kota Lama Semarang antara lain:

- a UU No 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya dan konsep-konsep pelestarian pada umumnya
- b Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999
- c Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999
- d Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999
- e Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003

2. Tahap II (PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN)

Tahap ini merupakan realisasi dari tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan, dimana segala peraturan yang ada akan direalisasikan pada usaha-usaha:

- a Dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BP2KL) untuk mengelola, mengembangkan, mengoptimalkan potensi Kota Lama Semarang
- b Terdapat 150 bangunan Kota Lama Semarang yang akan ataupun telah dikonservasi seperti Gereja Blenduk, Tekodeko, Spiegel

- c Pada tahun 2015 kawasan Kota Lama Semarang masuk dalam daftar sementara Cultural World Heritage UNESCO
- d Direncanakan pada tahun 2020 kawasan Kota Lama Semarang akan masuk dalam daftar tetap Cultural World Heritage UNESCO
- e Diadakannya Festival_Kota Lama Semarang yang menjadi program rutin sejak tahun 2012 dengan tema yang berbeda setiap tahunnya.

BAB III

ECOTOURISM SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN

3.1 Ecotourism Sebagai Strategi Pembangunan yang Tepat

Mulai disadari bahwa diperlukan adanya strategi yang menghubungkan antara wisata dan konservasi alam serta budaya. Diawali dengan adanya The Pacific Asia Travel Assosiation yang mengadakan konferensi mengenai strategi pembangunan dengan mempertimbangkan sekor wisata dan lingkungan yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan banyak gerakan yang sama seperti Deklarasi Manila dan UNEP. Menurut Goodwin (1997) kegiatan ekoturisme baik secara langsung atau tidak, memiliki peran dalam upaya melindungi dan mengelola habitat alam dan spesies yang ada di dalamnya. Penjelasan tersebut dijabarkan dengan tiga keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekoturisme.

Pertama, ekoturisme merupakan cara yang paling benar dan efektif untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengelola dan melindungi destinasi wisata. Dengan demikian ekoturisme merupakan strategi investasi jangka panjang untuk keberlangsungan destinasi wisata tersebut. Kedua, kegiatan ekoturisme memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan destinasi wisata. Masyarakat memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kegiatan ekoturisme sehingga dibutuhkan terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak pengelola dan masyarakat sekitar. Diperlukan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, kegiatan ekoturisme secara langsung maupun tidak akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan destinasi wisata bagi para turis. Para turis tersebut memiliki peran sebagai penyumbang suara/aspirasi, penyumbang dana serta pemimpin potensial yang dapat mewujudkan kegiatan ekoturisme.

Dengan demikian terdapat aspek penting yang terdapat dalam ekoturisme yang pertama yaitu konservasi yang merupakan tanggung jawab dalam pemeliharaan destinasi wisata. Konservasi dan pemeliharaan terhadap destinasi wisata merupakan investi jangka panjang yang dapat membuat destinasi wisata bertahan lama. Kedua, terjalinnya hubungan yang harmonis

antara aktivitas wisata, alam dan budaya, serta masyarakat sekitar. Hubungan harmonis yang terjalin memastikan bahwa seluruh strategi yang direncanakan akan terlaksana dengan efektif dan baik. Ketiga, adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Dengan segala strategi dan harapan yang ingin dicapai maka yang menjadi tujuan adalah terjadinya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Apabila konsep ekoturisme juga diterapkan pada kawasan Kota Lama Semarang maka segala keuntungan diatas akan didapatkan. Mulai dari konservasi dan perlindungan Kota Lama, masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari konservasi tersebut, hingga kesadaran yang tinggi dari para wisatawan untuk ikut berkontribusi menjaga dan melestarikan. Keuntungan yang didapat merupakan keuntungan jangka panjang yang akan terus berkembang. Dikarenakan apabila konservasi yang dilakukan baik maka masyarakat sekitarpun akan mendapat manfaat dari para wisatawan yang datang dan puas dengan Kota Lama, sehingga dari kepuasan tersebut akan menjadikan para wisatawan juga menjadi agen untuk melestarikan Kota Lama. Berdasarkan segala keuntungan yang didapat dari ekoturisme, tidak dapat dipungkiri bahwa ekoturisme hadir sebagai strategi pembangunan yang paling tepat dalam mengembangkan sektor pariwisata.

3.2 Faktor faktor yang Mendukung Ecotourism

Menurut Patterson (2002), ada beberapa karakteristik ecotourism. Ecotourism Mempunyai dampak yang rendah terhadap sumber daya alam dan teknik rekreasi di kawasan lindung. Melibatkan pemangku kepentingan (individu, masyarakat, wisatawan, operator tur dan lembaga pemerintah) dalam tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan. Melimitasi kunjungan ke area, baik dengan membatasi ukuran kelompok dan / atau dengan jumlah kelompok yang dibawa ke suatu area dalam satu musim. , mengarahkan pelanggan di wilayah yang akan dikunjungi dan juga menghormati privasi dan budaya masyarakat setempat.

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat local merupakan salah satu komponen berkelanjutan pada umumnya dan secara khusus bari ecotourism itu sendiri (Drake, 1991). Implementasi dari ecotourism ini sendiri sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat local dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini termasuk lapangan pekerjaan, pendapatan, perbaikan infrastruktur dan meningkatkan kepeduluan terhadap budaya dan lingkungan. Namun, untuk

mendapatkan dampak positif dari ecotourism ini, maka diperlukan kerjasama dari pemerintah, organisasi dan masyarakat local sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang paling utama dalam menentukan kesuksesan dari konsep ecotourism itu sendiri. Pemerintah dapat melakukan perbaikan sektor dengan menggunakan strategi ramah lingkungan dan membuat inovasi baru untuk bangunan yang belum tersentuh. Salah satu contoh bangunan yang telah direvitalisasi dan hingga kini telah menjadi tempat wisata adalah Spiegel. Tetapi pada dasarnya, revitalisasi bangunan tua di kota tua Semarang sulit karena terhambat oleh kepemilikan bangunan lama. Sebagian besar bangunan di daerah Kota Lama tidak diketahui oleh pemiliknya, sehingga ada kesulitan bagi pemerintah kota Semarang untuk memperbaharui bangunan. Namun, jika pemerintah telah mampu merevitalisasi bangunan, dapat dipastikan bahwa bangunan yang ada akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Lama Semarang. Perbaikan sektor pariwisata tidak harus dilakukan dengan membangun gedung baru, tetapi dapat dilakukan dengan memperbaharui bangunan lama dan menambah nilai ekonomi ke bangunan sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berlebihan dan tetap meningkatkan nilai pariwisata daerah Kota Lama.

Organisasi berskala internasional seperti juga memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi pariwisata di Semarang, sebagai contohnya AIESEC. Sebagai organisasi yang mendatangkan wisatawan asing ke Semarang, maka diperlukan pengenalan terhadap kearifan local yang ada di Semarang. Mengarahkan wisatawan ke daerah yang akan dikunjungi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai pariwisata di Kota Lama. Menurut data yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa banyak wisatawan dari negara lokal dan asing datang ke Semarang. Para wisatawan ini tentu tidak tahu kemana mereka harus berkunjung selama berada di Semarang. Pemerintah kota harus berusaha bekerjasama dengan organisasi untuk mempromosikan kawasan Kota Lama secara intensif sehingga dapat menjadi salah satu pilihan pariwisata wisatawan yang berkunjung ke Semarang.

Faktor pendukung yang terakhir dan memiliki peran yang cukup signifikan adalah dari masyarakat itu sendiri. Meskipun pembangunan di Kota Lama sudah dilakukan dengan baik, akan percuma apabila kesiapan masyarakat di sekitar Kota Lama masih kurang dalam membantu

pemerintah dalam mengolah sumber daya yang ada di Kota Lama itu sendiri. Pemerintah juga harus mampu memberdayakan masyarakat lokal yang berada di kawasan kota tua sehingga mereka dapat menjadi pemandu bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan kota tua guna memberikan rekomendasi tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai kawasan pariwisata di kota Tua. Dengan demikian, meningkatkan nilai pariwisata di kota tua dapat dilakukan dan orang-orang di sekitar kawasan Kota Lama dapat berpartisipasi aktif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat mereka. Hal ini juga berarti masyarakat yang ada di sekitar Kota Lama harus memiliki jiwa jiwa *entrepreneurship* untuk memanfaatkan hasil dari revitalisasi yang sudah dilakukan pemerintah sehingga pembangunan yang sudah dilakukan tidak sia sia dan pemerintah serta masyarakat sekitar dapat bekerjasama dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kota Lama dengan menggunakan konsep *ecotourism*.

3.3 Pengembangan Masyarakat

Terdapat lima unsur dalam pelaksanaan ekoturisme yaitu pendidikan (*Education*) dan interpretasi (*interpretation*), Konservasi (*Conservation*), Perlindungan atau Pembelaan (*Advocacy*), Keterlibatan komunitas setempat (*Community Involvement*), Pengawasan (*Monitoring*) (Yoeti, 2000: 40).

a. Pendidikan (*Education*) dan interpretasi (*interpretation*)

Aspek pendidikan merupakan bagian utama dalam mengelola ekowisata karena membawa misi sosial untuk menyadarkan keberadaan manusia, lingkungan, dan akibat yang mungkin ditimbulkan bila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan. Misi tersebut tidak mudah karena untuk menjabarkan dalam satu paket wisata seringkali bentrok dengan kepentingan antara perhitungan ekonomi dan terjebak dalam misi pendidikan konservatif yang kaku (Yoeti, 2000: 40). Wisatawan ekowisata akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai ekosistem, keunikan biologi dan kehidupan sosial di kawasan yang dikunjungi, sehingga wisatawan tersebut meningkat kesadarannya untuk ikut melestarikan alam. Interpretasi/penafsiran terhadap lingkungan serta pendidikan terhadap wisatawan tentang lingkungan yang dikunjungi adalah unsur-unsur yang menentukan keberhasilan ekowisata (Department of Tourism, Small Business and Industry, 1997: 7). Hal ini dapat dituangkan dalam

e. Pengawasan (*Monitoring*)

Menurut Horwich, R..et all (1995: 176) ekowisata yang benar harus didasarkan atas sistem pandang yang mencakup di dalamnya prinsip berkesinambungan dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat di dalam areal-areal potensial untuk pengembangan ekowisata. Ekowisata harus dilihat sebagai suatu usaha bersama antara masyarakat setempat dan pengunjung dalam usaha melindungi lahan-lahan (*wildlands*) dan aset budaya dan biologi melalui dukungan terhadap pembangunan masyarakat setempat. Pembangunan masyarakat di sini berarti upaya memperkuat kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk mengontrol dan mengelola sumber daya yang sangat bemilai dengan cara-cara yang tidak hanya dapat melestarikan sumber daya akan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan kelompok tersebut secara sosial, budaya dan ekonomi. Dalam pengelolaan Ekowisata, diperlukan pengawasan (*monitoring*) yang berkesinambungan sehingga masalah integritas, loyalitas, atau kualitas dan kemampuan untuk mengelola akan sangat menentukan untuk mengurangi dampak yang timbul (Yoeti, 2000: 41).

Dari kelima unsur diatas dapat dilihat bahwa peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ekoturisme. Maka dari itu pengembangan ekoturisme dalam kawasan Kota Lama Semarang juga membutuhkan peran serta masyarakat yang kuat. Meskipun segala fasilitas dan konservasi Kota Lama telah dilakukan akan sia-sia tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Sedangkan menurut Sunarto (1994; 23) terdapat tiga syarat tumbuhnya peran serta yaitu: 1. ada kesempatan untuk ikut dalam pembangunan; 2. Ada kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan; 3. ada kemauan untuk berperan serta.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berinisiatif sendiri (mandiri) untuk meningkatkan potensi pariwisata dalam upaya mengembangkan ekowisata di daerah Kota Lama Semarang. Hal ini dibuktikan dengan jarangnyanya masyarakat untuk mengikuti event yang ada di Kota Lama ataupun melakukan kegiatan yang menunjang kegiatan ekowisata. Seperti pada saat event Festival Kota Lama Semarang, para wisatawan kebanyakan bukan masyarakat setempat. Meskipun terdapat bazaar UMKM tetapi tidak ada satupun pelaku UMKM yang merupakan masyarakat sekitar Kota Lama.

Seharusnya adanya acara Festival Kota Lama ini menjadi peluang dan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan.

Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat serta kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan menggambarkan bahwa masyarakat juga akan enggan dan tidak sadar untuk melakukan kegiatan konservasi maupun perlindungan kawasan Kota Lama Semarang. Keengganan dan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan Kota Lama Semarang juga dibenarkan oleh Sekretaris Dinas dan Pariwisata Kota Semarang, Kasturi, yang menyatakan bahwa banyak lampu penerang jalan di sekitar Taman Sri Gunting yang hilang karena dicuri, tanaman di Taman Sri Gunting rusak bahkan hilang serta rusaknya fasilitas-fasilitas lain yang kemungkinan besar diakibatkan oleh masyarakat sekitar. Padahal peran masyarakat selain sebagai agen yang melestarikan juga sebagai agen controlling yang mengontrol dan mengawasi bagaimana pelaksanaan pengembangan ekoturisme di Kota Lama Semarang.

Keengganan dan ketidaksadaran masyarakat untuk peduli dan melestarikan Kota Lama Semarang membuat fasilitas yang diberikan pemerintah tidak terjaga dengan baik dan rusak. Dengan keadaan seperti itu, membuat para wisatawan tidak betah atau mungkin tidak akan kembali lagi mengunjungi Kota Lama Semarang. Hal tersebut akan membuat Kota Lama Semarang terbenakalai dan tidak ada pemasukan dan perkembangan ekonomi sehingga destinasi wisata tidak akan bertahan lama.

Keadaan yang terjadi bukan merupakan kesalahan yang berasal dari salah satu pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Tetapi perlu disadari bersama bahwa pelaksanaan ekoturisme merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, perlu adanya penekanan pada salah satu unsur ekoturisme yaitu pendidikan (*Education*) dan interpretasi (*interpretation*). Sebelum pelaksanaan konservasi serta pemanfaatan ekonomi dari destinasi wisata, diperlukan adanya pendidikan dan interpretasi mengenai sejarah dan kebudayaan mengenai Kota Lama Semarang itu sendiri. Hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengedukasi dan memberikan penjelasan yang baik mengenai Kota Lama Semarang.

Pemerintah juga dapat menggandeng local community yang ada seperti AIESEC untuk mengedukasi dan memberikan interpretasi tersebut. Tujuan dilaksanakannya proses edukasi dan interpretasi tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana pentingnya untuk melestarikan Kota Lama Semarang sehingga masyarakatpun akan mendapat manfaat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, ternyata Kota Semarang secara khusus wilayah Kota Lama memiliki banyak potensi yang bernilai ekonomi khususnya di bidang pariwisata. Namun, penelitian ini melihat masih kurangnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di Kota Lama sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan dilakukannya banyak revitalisasi di wilayah Kota Lama, diperlukan suatu konsep yang dapat digunakan tidak hanya untuk meningkatkan sector pariwisata di wilayah Kota Lama, tetapi juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencapai *Sustainable Development*. Penelitian ini menyarankan penggunaan konsep *ecotourism* yang mana *ecotourism* merupakan cara yang paling benar dan efektif untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengelola dan melindungi destinasi wisata. Dengan demikian ekoturisme merupakan strategi investasi jangka panjang untuk keberlangsungan destinasi wisata tersebut. Kedua, kegiatan ekoturisme memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan destinasi wisata. Di lain sisi, kontribusi dari masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama Semarang akan sangat berdampak dalam suksesnya implementasi dari konsep *ecotourism* itu sendiri. Masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama Semarang harus memiliki *sense of belonging* dengan wilayah tersebut dan memiliki keinginan untuk turut andil dalam melakukan dan menyukseskan pembangunan di Kota Lama. Sehingga dibutuhkan kolaborasi secara nyata baik dari pemerintah dalam melakukan revitalisasi dan memberikan fasilitas fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang Kota Lama sebagai wilayah pariwisata, dan juga dari masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Lama untuk dapat memanfaatkan hasil dari revitalisasi dan membantu pemerintah dalam meningkatkan sector pariwisata dari Kota Lama.

Daftar Pustaka

- Boo, Elizabeth., 1995. *Pelaksanaan Ekoturisme untuk Kawasan-Kawasan yang dilindungi*.
Ekoturisme : Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola. Dalam Lindberg, Kreg and
Hawkins, Donald. The Ecotourism Society North Bennington, Vermont
- Goodwin, H. 1997. Ekowisata Terrestrial. Di dalam: Myra P.Gunawan, editor. Perencanaan
Pariwisata Berkelanjutan. Prosiding Pelatihan dan Lokakarya. Bandung:ITB
- Gossiling, S. 1999. *Ecotourism: A Means to Safeguard Biodiversity and Ecosystem Function*.
Ecological Economics (29) : 303-320.
- Honey, M. 1999. *Ecotourism and Sustainable Development: How Owns Paradise*. Washington
DC: Island Press.
- Horwich, Robert H et all. 1995. *Ekoturisme dan Pembangunan Masyarakat Pengalaman di
Belize*. Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola. Penyunting Kreg Lindberg
and Donald E. Hawkins. The Ecotourism Society North Bennington, Vermont
- Sumarto, Slamet, 1994. *Peran Serta Masyarakat dalam Peletarian Peninggalan Sejarah di Jawa
Tengah Ditinjau dari Usia dan Sosial Ekonomi*. Tesis
Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Wunder, S.2000. *Ecotourism and Economic Incentive an Empirical Approach*. Ecological
Economics. 29:465-479.
- Yoeti, Oka A. 2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. PT. Pertja Jakarta.